

# MENGENTASKAN KEMISKINAN RAKYAT ACEH DENGAN SYARI'AH

M. Shabri Abd. Majid

*Fakultas Ekonomi*

*Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh*

*hannanan@gmail.com*

## ABSTRACT

*This study discusses the concept of poverty from an Islamic perspective. It then attempts to propose a holistic strategy to alleviate poverty in Aceh within the Shari'ah framework. To eradicate poverty, inter alia, the Acehnese should constantly and steadfastly improve their devoutness to Allah SWT. Their daily activities must be always in harmony with the Divine injunctions, the Holy Qur'an and Hadith. The elite groups must compromise and do not monopolize power and wealth in Aceh. Developmental budget should be proportionately distributed among the people of Aceh. Just economic and democratic political systems which are free from corruption and malpractices must be upheld. The rich Acehnese must fulfil their rights to the poor by paying zakat (Islamic tax). That ruling government should not be oppressive; the political elites should not take a chance to reap their benefits in the political instability in Aceh. The peaceful Aceh should be preserved so that the continuous efforts to alleviate poverty can be easily intensified.*

**Keywords:** *Poverty alleviation, Islamic economics, Shari'ah framework, Aceh*

## ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan tentang konsep kemiskinan dalam pandangan Islam. Tulisan ini berusaha untuk memberikan suatu strategi holistik dalam pengentasan kemiskinan di Aceh sesuai dengan koridor syariah Islam. Dalam konteks tersebut, masyarakat Aceh harus secara konstan dan terus menerus meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT. melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis. Sementara itu, kaum elit di Aceh harus bisa bekerjasama dan tidak memonopoli kekuasaan dan kekayaan. Dana pembangunan di Aceh harus dialokasikan secara proporsional untuk kepentingan rakyat. Begitu juga dengan sistem politik demokrasi dan ekonomi harus terbebas dari korupsi dan penyelewengan. Kaum kaya wajib melaksanakan kewajiban mereka terhadap kaum miskin dengan cara membayar zakat. Di pihak pemerintah sendiri tidak memaksakan kehendak; dalam artian bahwa elit politik di Aceh tidak mengambil kesempatan dalam ketidakstabilan politik di daerahnya. Akhirnya, perdamaian di Aceh harus tetap dijaga sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** *pengentasan kemiskinan, ekonomi Islam, bingkai syariah, Aceh*

## Pendahuluan

Sebagai agama pembawa keselamatan dan kesejahteraan bagi umat sejagat, Islam sangat sangat anti-kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai sumber berbagai kejahatan dan kegiatan sumbang (Ataul Huq, 1993). Orang miskin (bahasa Aceh: *Ureung Gasien*) lebih mudah dijerumuskan setan ke lembah kebejatan dan kenistaan. Rasulullah SAW bersabda: "*Kemiskinan mendekati kekufuran*" (H.R. as-Sayuti). Hal ini juga diakui pakar ekonomi Barat. Alcock (1993) misalnya menyebutkan bahwa kemiskinan adalah salah satu penyakit sosial. Tidak seperti kemiskinan konvensional yang hanya diukur dengan material semata, kemiskinan dalam Islam lebih bersifat komprehensif, meliputi aspek material dan spiritual. Ini berimplikasi bahwa tolok ukur kemiskinan antara konsep konvensional dan Islam adalah berbeda. Bisa jadi seseorang itu kaya bila menggunakan ukuran konvensional, tapi miskin bila dilihat dengan kaca mata ekonomi Islam. Berbedanya definisi dan ukuran kemiskinan antara konsep kemiskinan Barat dengan Islam otomatis menyebabkan kriteria sebuah kesuksesan dalam program pengentasan kemiskinan juga berbeda. Mungkin program pengentasan kemiskinan itu dikatakan berhasil bila dilihat dari perspektif Barat, tapi ia gagal secara Islam. Demi berhasilnya program pengentasan kemiskinan di Aceh, yang pertama sekali harus kita identifikasikan adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Dengan mengetahui "*root of the problems*" (akar masalah), maka dengan mudah kemiskinan yang mendera lebih separuh penduduk Aceh dapat dientaskan secara tuntas.

Dalam menganalisa konsep kemiskinan baik dalam skop ke-Aceh-an, ke-Indonesia-an maupun dalam konteks internasional, sungguh sangat langka, bahkan hampir tidak ada sama sekali tulisan-tulisan yang mengkaji kemiskinan — definisi, penyebab, dan strategi untuk memberantas kemiskinan — berdasarkan konsep Ilahiah. Untuk mengisi kekosongan (*gap*) ini, maka tulisan ini difokuskan untuk mengeksplorasi kemiskinan yang diderita Rakyat Aceh berdasarkan kaca mata ekonomi Islam.

Tulisan ini akan membahas konsep kemiskinan dalam Islam, sekaligus menawarkan beberapa strategi pengentasan kemiskinan Rakyat Aceh dalam perspektif Syari'ah. Namun, sebelum strategi pengentasan itu ditawarkan, makna dan penyebab kemiskinan menurut Islam akan dibahas terlebih dahulu.

## Arti Kemiskinan Versi Islam

Salah satu keunikan Islam adalah tidak adanya pemisahan antara aspek moral dan materi, spiritual dan fisik dan aspek dunia dan akhirat dalam kehidupan seorang Muslim, tidak seperti faham sekularisme yang memisahkan antara keduanya. Begitu juga dalam mendefinisikan kemiskinan, kita harus mempertimbangkan ke-dua aspek ini secara berimbang. Dengan kata lain, seseorang yang mungkin dikategorikan "*miskin secara materi*" yang biasanya diukur dengan unit moneter (uang), belum tentu tergolong ke dalam kategori orang-orang "*miskin secara spiritual*", yang biasanya diukur dengan kadar kedekatan kepada Allah SWT (ketakwaan). Dalam bukunya "*Economic Development and Social Peace in Islam*", Mannan (1989) menegaskan bahwa kemiskinan dalam Islam haruslah dilihat sebagai konsep integral antara aspek moral (budaya dan spiritual) dan aspek material.

Secara material (ekonomi), orang-orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Definisi orang "*miskin secara material*" secara detail, dapat kita simak dari Laporan Bank Dunia (2000/2001) sebagai berikut:

*"Jangan tanyakan kepada saya tentang kemiskinan sebab kamu sendiri telah mewawancarai saya di depan rumah saya sendiri. Lihatlah rumah saya dan hitung berapa banyak lubang yang terdapat di atap; lihat perabotan rumah dan pakaian yang saya pakai; lihat semua dan tulis apa yang kamu lihat. Apa yang kamu dapati, itulah kemiskinan".*

Sedangkan, orang "miskin secara spiritual" adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan spiritual minimum, seperti pengetahuan agama (ukhrawi) dan umum (duniawi) yang diperlukan dalam "berbudiyah", dan "bertaqarrub" kepada Allah SWT dengan mengedepankan nilai-nilai "akhlaqul karimah". Jadi, kombinasi ke dua definisi kemiskinan ini adalah definisi ideal kemiskinan versi Islam. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW: "Dari Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Kekayaan itu tidak terletak pada banyaknya jumlah harta dunia, tetapi kekayaan itu adalah terletak pada kekayaan hati" (H.R. Muslim). Tentu, begitu juga sebaliknya, "kemiskinan itu tidaklah terletak pada sedikitnya harta, tetapi terletak pada kering kerontangnya hati".

Merujuk pada definisi ini, maka jumlah "ureung gasien" di Aceh akan lebih banyak dibandingkan dengan angka-angka yang dilaporkan pemerintah. Dampak krisis politik Aceh yang berkepanjangan, mega malapetaka Tsunami 2004 dan krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, dipercayai, telah menjadi penyebab tambahan meningkatnya jumlah "ureung gasien" di Aceh baik secara ekonomi maupun spiritual. Sebenarnya, krisis ekonomi dan politik yang telah menggiring kita ke lembah kemiskinan, sejak lebih dari 1.400 tahun yang silam telah disahihkan Alquran sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Berikut ini dipaparkan beberapa penyebab kemiskinan versi Qur'ani.

### **Penyebab Kemiskinan Versi Qur'ani**

Fakta menunjukkan bahwa kemiskinan bukan saja monopoli masyarakat Aceh, tetapi kemiskinan juga monopoli mayoritas dunia Islam. Menurut Laporan Bank Dunia (2000/2001), dari hampir 6 juta penduduk dunia, sebanyak 1,2 juta penduduk dunia yang berpendapatan kurang dari US\$ 1 sehari adalah mayoritas umat Islam. Kenapa kemiskinan dimonopoli umat Islam? Apakah karena Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dunia Islam terbatas jumlahnya dibandingkan dengan negara maju? Berdasarkan realitas di lapangan, tentu, jawabannya tidak. Ketidakmampuan umat Islam untuk mengeksplorasi SDA, sebenarnya, merupakan penyebab utama mayoritas umat Islam miskin. Secara implisit ini menunjukkan bahwa kata-kata yang terkandung dalam definisi ilmu ekonomi konvensional yang menyebutkan "ketersediaan SDA terbatas untuk memenuhi keperluan manusia yang tidak terbatas" sama sekali tidak bisa diterima Islam. Tidak sedikit ayat Alquran yang menegaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan SDA (nikmat) yang melimpah ruah baik bersumber dari langit, darat, dan bahkan lautan. Allah berfirman:

*"Adalah Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai"; (Q.S. Ibrahim: 32);*

*"...dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak mampulah kamu menghitungnya..." (Q.S. Ibrahim: 34);*

*"...dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) daripada-Nya..." (Q.S. al-Jatsiyah: 13).*

*"Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi, dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai jalan) penghidupan (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur." (Q.S. al-'Araf: 10).*

Semua ayat ini menunjukkan bahwa; “*sebenarnya bukanlah SDA (nikmat) yang langka, tetapi kemampuan (ilmu) manusialah yang terbatas untuk mengeksplotasi SDA alam yang menyebabkan manusia terperosok dalam kemiskinan*”. Artinya, Islam tidak mengenal konsep kelangkaan (*scarcity*) SDA, yang ada hanyalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) itu sendiri dalam mengeksplorasi SDA.

Penyebab-penyebab kemiskinan yang melanda dunia Islam, pada umumnya, adalah sama dengan penyebab berlakunya kemiskinan di Aceh. Selain dualisme ekonomi, keuangan, dan sistem pasar dan diskriminasi regional, pemikir ekonomi mengklaim bahwa kemiskinan dunia ke-3 adalah akibat dari eksploitasi penjajah. Klaim seperti ini, sebenarnya, sungguh tidak patut dipertahankan karena ianya tidak lebih dari “*lip service*” semata dengan mengkambinghitamkan (*scape goat*) penjajah untuk menutupi kelemahan dan kegagalan kita sendiri dalam mensejahterakan umat. Apakah kita lupa bahwa Jepang yang telah luluh lantak di bom negara sekutu dalam perang dunia ke-II, ternyata kini telah bangkit menjadi negara maju, bahkan disegani Amerika, negara “*super power*” tunggal dunia? Selanjutnya, menurut Irfan Ul-Haq (1996), sekurang-kurangnya, terdapat delapan penyebab utama kemiskinan menurut versi Qur’ani.

1. Kemiskinan yang dialami masyarakat Islam adalah disebabkan oleh ketidaktaatan mereka terhadap ajaran Ilahi. Ini misalnya terjadi akibat ada segolongan manusia yang memakan harta anak yatim (Q.S. al-Maun: 1-7) dan membiarkan anak-anak yatim yang belum ‘*akil baligh*’ untuk mengurus hartanya (Q.S. an-Nisa’: 6). Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kemiskinan berkelanjutan (*sustanaible poverty*) yang mendera ribuan anak yatim adalah disebabkan oleh tidak bertanggungjawabnya para penjaga mereka.
2. Kemiskinan terjadi bukan karena kekurangan atau kelangkaan SDA, tetapi kemiskinan itu terjadi akibat ulah tangan manusia sendiri. Firman Allah SWT: “*Dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri...*” (Q.S. as-Syura: 30). Allah SWT menjamin rezeki semua makhluk yang bernyawa (Q.S. al-’Ankabut: 60) dan mereka tidak akan kelaparan (Q.S. Taha: 118-119).
3. Kemiskinan itu terjadi akibat tidak bertanggungjawabnya orang kaya (bahasa Aceh: *Ureung Kaya*) terhadap “*ureung gasien*”. Allah berfirman: “*Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya)*” (Q.S. al-Ma’arij: 18); dan “*Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak, pangkat dan pengaruh)*” (Q.S. at-Takatsur: 1). Masih banyak ayat lain mengandung makna yang sama, seperti Q.S. al-Munafiqun: 7; dan al-Haqq: 34 yang mengandungi maksud yang sama. Ke-semua ayat ini mengklaim bahwa kemiskinan segolongan umat manusia adalah berlaku akibat ketidakpedulian dan ketidakpatuhan golongan kaya terhadap suruhan Allah SWT untuk menunaikan hak-hak si miskin (membayar zakat). Sebenarnya, cukup banyak ayat Alquran yang mengecam sikap orang kaya yang enggan membayar zakat, seperti akan ditimpa kesusahan, kesengsaraan (Q.S. al-Lail: 10-13); kecelakaan hidup dan bahkan akan dicampakkan ke dalam neraka “*Hutamah*” (Q.S. al-Humazah: 1-4) di hari akhirat kelak. Untuk itu, janganlah kita sekali-kali menjadikan harta sebagai tujuan hidup dan “*segala-galanya*” dalam hidup ini. Harta itu hanya sebagai alat menuju “*mardhatillah*”.
4. Kemiskinan itu disebabkan oleh praktek diskriminasi alokasi hasil eksplorasi SDA oleh segolongan manusia terhadap golongan yang lain (Q.S. Ali Imran: 180; at-Taubah: 34; al-Anfal: 8 dan 40, dan al-Hadid: 7). Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa harta itu, sebenarnya, adalah milik mutlak Allah SWT, dan kita hanya sebagai makhluk yang mendapat amanah (*trustee*) untuk mengelola harta sesuai ketentuan agama. Allah melarang umatnya memakan (menggunakan) harta orang lain yang bukan hak miliknya (Q.S. al-Fajr: 18-20),

karena malpraktek ini akan menghambat kemakmuran ekonomi. Seharusnya kita yang kebetulan mendapat kepercayaan kurnia harta, janganlah sekali-kali bersikap bakhil dan congkak seolah-olah harta itu adalah milik mutlak kita yang tidak akan pernah berkurang dan habis. Sejarah telah mencatat dan Alquran telah merekam, dalam sekelip mata saja Allah SWT telah memusnahkan harta tuan kebun yang congkah dan bakhil (Q.S. al-Qalam: 17-24).

5. Kemiskinan itu terjadi akibat sikap manusia yang malas bekerja. Manusia selalu rugi (Q.S. al-'Ashr: 1-3) tanpa mau bekerja (Q.S. al-Jum'ah: 10) dan meminta-minta adalah pekerjaan terkutuk (Q.S. al-Haqq: 34). Ini berimplikasi bahwa kemiskinan itu bukanlah suatu takdir dan nasib badan, tapi karena kemalasan manusia sendiri.
6. Kemiskinan itu terjadi akibat terkonsentrasinya kekuasaan politik dan ekonomi pada golongan tertentu. Ini dapat kita lihat dari kisah Fir'aun dengan kaum Israil di Mesir dan cerita perbedaan kesejahteraan yang eksis antara warga Mekkah dan kaum Quraisy pada zaman Rasulullah SAW. Inilah sebabnya zakat diwajibkan agar harta itu tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu saja. Demikian pula, institusi "*syura*" (musyawarah) hendaklah dioptimalkan dalam menyelesaikan permasalahan umat sehingga konsentrasi kekuasaan politik oleh golongan elit tereliminir.
7. Kemiskinan itu terjadi akibat pengeksploitasian dan penindasan baik dalam aspek sosial, politik dan ekonomi oleh golongan tertentu ke atas golongan lainnya. Ini dapat kita lihat dari sistem perbudakan (*slavery*) dan praktek riba dalam sistim pinjam-meminjam yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Realitas ini telah mendorong Karl Marx, bapak Komunis dunia dalam buku populernya "*Das Capital*" menulis bahwa: "*orang-orang kaya senantiasa mengeksploitasi buruh dan modalnya untuk memperkaya diri sendiri tanpa pernah terpikirkan untuk mengentaskan kemiskinan yang mendera kaum lemah*".
8. Kemiskinan itu terjadi akibat malapetaka dan perang. Kondisi ini seperti dikisahkan Alquran tentang kemiskinan yang dialami para korban perang yang telah diusir dari kampung halamannya (Q.S. al-Hasyr: 8-9). Krisis politik yang berkepanjangan di Aceh telah melahirkan ribuan janda, anak yatim-piatu, dan "*hamba laeh*". Itulah sebabnya, sebagai agama pembawa kedamaian, Islam sangat membenci perang. Usaha-usaha untuk mewujudkan kedamaian di Aceh menuju Aceh bermartabat perlu ditingkatkan.

### **Strategi Islam Mengentaskan Kemiskinan**

Berulang-kalinya Alquran menyebutkan masalah kemiskinan adalah merupakan suatu pertanda bahwa kemiskinan itu merupakan problema kehidupan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memberantasnya haruslah mengadopsi pendekatan-pendekatan makro (komprehensif) dan *holistic* yang tidak saja menuntut partisipasi dan peran aktif golongan miskin, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Proposal strategi memberantas kemiskinan rakyat Aceh tentunya harus mampu mengikis penyebab utama kemiskinan, seperti telah disebutkan di atas.

### **Strategi Umum**

Pada umumnya dalam memberantas kemiskinan hendaknya pemerintahan Aceh membuat kebijakan ekonomi yang bersifat pragmatis, implementatif, dan berorientasikan untuk mengangkat harkat dan martabat ekonomi masyarakat Aceh kelas menengah ke bawah. Pembangunan haruslah dikonsentrasikan untuk membiayai prasarana dan sarana yang manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat miskin Aceh, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, irigasi dan transportasi sehingga, pada gilirannya, akan mampu meningkatkan produktivitas

kerja mereka. Pemerintahan Aceh juga harus menyediakan *training-training* dan pendidikan yang berwawasan kerja secara gratis, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, bertujuan untuk “mencungkil” bakat terpendam dan potensi mereka sehingga secara aktif dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan Aceh di masa-masa mendatang. Pemerintahan Aceh juga harus membantu menyediakan modal kerja (*working capital*) bagi kaum dhu’afa dengan sistem pinjaman meminjam bagi hasil (non-riba). Ini dapat dilakukan dengan menginstruksikan kepada semua bank yang beroperasi di dalam Aceh agar mempermudah pengurusan untuk mendapat pembiayaan (modal usaha), tentunya, berdasarkan sistem pinjam-meminjam *ala* Syari’ah baik secara ‘*debt-based financing*’ (seperti *murabahah* dan *bay’ mu’ajjal*) ataupun ‘*equity-based financing*’ (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*). Dan bank-bank ini haruslah memiliki cabang-cabang di setiap daerah sehingga akan memudahkan orang-orang kampung untuk melakukan transaksi.

Selanjutnya, dana pembangunan hendaklah tidak bersumber dari pinjaman atau hutang yang mengharuskan pemerintah untuk membayar bunga (riba). Pembangunan Aceh tidak hanya dikonsentrasikan di kawasan-kawasan perkotaan atau pinggiran kota saja, tetapi pembangunan yang berimbang antara daerah perkampungan dan perkotaan harus direalisasikan. Pemerintah Aceh harus memastikan Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima para pekerja di setiap daerah hendaklah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Upah yang diterima seorang pekerja yang telah mempunyai keluarga dan anak dibedakan dengan upah yang diterima seorang pekerja yang masih berstatus ‘bujang’, misalnya melalui skim “*Cost of Living Adjustments*” (COLAs).

Dan yang sangat penting sekali adalah dalam setiap tindak tanduknya, pemerintah Aceh harus bersikap jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab sehingga memudahkan mengorganisir masyarakat agar mau berkerja sama, saling bahu-membahu menyukkseskan pembangunan negara. Karena kerja sama atas landasan *amar ma’ruf wa nahi munkar* diyakini akan mendapat dukungan sepenuh hati siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah SWT. Hal ini seperti disebutkan Allah SWT dalam ayat berikut:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dengan demikian, dalam membangun negara, pemerintah Aceh harus melihat rakyat sebagai aset pembangunan yang sangat potensial dan bukan sebagai beban negara. Untuk merealisasikan ini, menurut Muhammad Akram Khan (1994), rakyat hendaklah dilibatkan secara lebih aktif serta diberikan kebebasan dalam membuat keputusan, terutama menyangkut dengan keinginan positif mereka untuk memberdayakan ekonominya. Semua ini, pada gilirannya, akan membantu pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat ekonomi rakyat secara *gradual*, tapi pasti dan menyeluruh. Penglibatan masyarakat Aceh secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi pemerintah adalah merupakan insentif yang sangat berharga dalam memotivasi mereka untuk merubah nasib dan membangun ekonomi dirinya sendiri, keluarganya, dan nasib pembangunan ekonomi negara pada umumnya.

### ***Strategi Khusus***

Secara lebih khusus, strategi Islami untuk memberantas kemiskinan rakyat Aceh yang melibatkan peran aktif individu, masyarakat, dan pemerintah melalui:

1. Pembangunan ekonomi Aceh harus diprioritaskan untuk mengangkat harkat dan martabat golongan miskin. Pembangunan harus mampu membuka peluang kerja bagi golongan tidak mampu dan sistem rekrutmen (penyeleksian pegawai negeri sipil – PNS) haruslah

- mengedepankan nilai-nilai *akhlaqul karimah*, tidak bersifat pilih kasih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terhadap faktor-faktor produksi — tanah, buruh, modal, dan *enterpreneurship* — yang digunakan dalam membangun ekonomi negara harus diberi kompensasi yang proporsional dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. A.M. Sadeq (1989), menyarankan agar sewa tanah, upah buruh, keuntungan atas modal dan jerih payah *enterpreneurship* harus dibayar secara proporsional, sekurang-kurangnya, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primer mereka.
2. Pemerintah Aceh harus memastikan ketersediaan semua barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar mencukupi dan bebas dari praktek monopoli. Pemerintah harus mengontrol semua harga barang dan jasa kebutuhan pokok dijual dengan harga yang patut sehingga mampu dibeli oleh masyarakat golongan miskin. Pedagang yang menaikkan harga secara sepihak dan melakukan monopoli harus mendapat hukuman setimpal. Dalam hal ini, kita harus salut atas tindakan pihak Kementerian Perdagangan dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia, yang langsung terjun ke pasar-pasar untuk mengawasi harga jual barang kebutuhan pokok. Jika beliau mendapati ada “pedagang nakal”, maka tanpa segan-segan kementerian ini akan mencabut surat izin berniaga. Sebaliknya, terhadap pedagang-pedagang yang jujur, maka setiap tahun beliau menganugerahkan “award” atau hadiah kepada mereka. Artinya, baik produsen maupun konsumen haruslah melakukan aktivitas ekonomi mereka berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jika berlaku praktek-praktek ekonomi yang merugikan rakyat banyak di pasar, maka pemerintah harus bertindak tegas tanpa pilih kasih.
  3. Pemerintah Aceh harus menyediakan subsidi untuk golongan miskin terutama subsidi modal usaha dan subsidi terhadap barang-barang kebutuhan primer. Kebijakan ekonomi pemerintah yang menjual semua barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah patut dijadikan program berkelanjutan dalam usaha membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pemerintah secara kontinyu memberi bantuan khusus kepada siapa saja yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, seperti penyediaan rumah murah, fasilitas kesehatan murah dan fasilitas primer lainnya. Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi lain tidak hanya terkonsentrasi di kota saja, tetapi juga di kampung-kampung karena masyarakat perkampungan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat merasakan nikmat pembangunan.
  4. Pemerintah Aceh harus menyediakan bantuan/pinjaman modal kepada si miskin melalui lembaga-lembaga keuangan Syari’ah. Hubungan dan nilai-nilai kasih sayang masyarakat golongan kaya terhadap masyarakat miskin perlu dipupuk lebih subur. Bila si miskin memerlukan pinjaman, si kaya dengan suka rela dan ikhlas memberi pinjaman, terutama, dalam bentuk *Qard Hassan* yang bebas dari sistem bunga. Seandainya si miskin tidak mampu membayar hutang tersebut dengan alasan logis, maka pemerintah atau si kaya tidak bisa memaksa si miskin untuk membayarnya. Dan jika si miskin betul-betul tidak mampu membayarnya setelah diberi masa tertentu, maka pemerintah atau si kaya hendaklah membebaskan si miskin dari kewajiban membayar hutang tersebut.
  5. Dalam melakukan kebijakan fiskal, Pemerintah Aceh selalu bertindak secara rasional. Penerimaan negara dari sumber-sumber pajak harus dipungut secara *progressive tax* (semakin banyak seseorang memiliki harta/kekayaan yang diharuskan membayar pajak, maka semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan). Juga mereka yang telah membayar zakat harus dibebaskan/dikurangi dari keharusan membayar pajak (*tax exemption/ deduction*). Karena cara ini akan membantu merapatkan *gap* antara si kaya dengan si miskin. Pembiayaan pembangunan negara harus dilakukan secara selektif, hemat cermat,

dan berdasarkan skala prioritas. Birokrasi pemerintah harus simpel, transparan dan tidak berbelit-belit. Semua biaya administrasi dan operasional pembangunan ditekan seminimal mungkin (secara efisien plus efektif), namun tanpa mempengaruhi kualitas, prioritas dan sasaran utama pembangunan negara.

6. Dalam setiap kebijakan moneter, Pemerintah Aceh harus mengukuhkan sistem perekonomian negara yang stabil dengan tingkat inflasi yang rendah dan sistem perbankan yang Islami. Sistem pinjam-meminjam harus bebas bunga dengan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*).
7. Pemerintah Aceh harus melakukan restrukturisasi institusinya baik institusi ekonomi maupun institusi politik secara *gradual*, tapi pasti dan kontinyu. Di samping itu, pemerintah harus mendorong pengoperasian bank-bank syari'ah, *takaful* (asuransi Islam), dan *ar-Rahn* (pajak gadai Islam), dan institusi *Baitul Mal* atau Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS). Institusi-institusi tersebut mesti difungsikan secara optimal. Begitu juga institusi *Wilayatul Hisbah* (WH) yang ditugasi untuk mengawasi khalwat, perjudian, dan khamar, harus diperluas tugasnya termasuk dalam mengawasi pasar, memastikan terlaksananya *amar ma'ruf wa nahi munkar* dalam semua aspek, termasuk ekonomi, membuat perencanaan, memastikan pengimplementasian dan memonitor proyek-proyek yang dijalankan pemerintah, seperti telah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW, patut dijadikan pedoman. Atau mungkin institusi *Diwan* yang telah diagendakan Khalifah Umar bin Khattab ra bisa dijadikan pedoman alternatif pemerintah. Institusi *Diwan* ini bertugas untuk melakukan sensus penduduk secara reguler pada setiap periode. Berdasarkan hasil sensus ini, Umar bin Khattab menetapkan jumlah gaji pensiunan minimum yang akan diberikan kepada para janda, anak-anak yatim, orang-orang yang telah berjuang di medan perang membela Islam sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, dan semua orang cacat, sakit, serta orang jompo. Jumlah minimum gaji pensiunan yang ditetapkan adalah sebanyak 250 dirham setiap tahun. Bahkan contoh keseriusan Umar bin Khattab dalam memberantas kemiskinan dapat dirujuk dengan tindakan nyata langsungnya yang melakukan kajian ilmiah terhadap 30 orang dengan tujuan untuk mengetahui berapa kebutuhan minimal rata-rata per-hari sebenarnya yang diperlukan seseorang penduduk agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Dari kajian ilmiahnya itu, Umar berkesimpulan bahwa baik lelaki maupun perempuan, di samping menerima gaji pensiun mereka juga harus diberikan tunjangan-tunjangan (*allowances*) makanan sebanyak dua kali sehari agar kebutuhan primer mereka terpenuhi. Namun sayangnya, sebelum beliau dapat menjalankan institusi *Diwan* ini secara sempurna, beliau telah menghadap Ilahi. Setelah kepergian beliau menghadap Ilahi, institusi *Diwan* ini tidak pernah lagi dipikirkan, apalagi coba dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin dunia Islam. Bukankah ini merupakan peluang terbaik baik kita sebagai negara penghuni Muslim terbesar di dunia, untuk melanjutkan ide-ide yang telah dibuat di Mekkah oleh Umar bin Khattab RA(?) Bukan mustahil usaha untuk menghidupkan *Diwan* atau apa pun namanya dalam konteks ke-Acehan ini akan mampu memberantas kemiskinan yang melilit sebagian besar umat Islam.

Bila semua usaha di atas, ternyata, masih belum mampu memberantas kemiskinan rakyat Aceh, maka barulah dana yang bersumber dari zakat baik *Zakat al-Mal* (zakat harta) maupun zakat fitrah digunakan. Agar tujuan ini berhasil, maka pemerintah harus mengoptimalkan fungsi zakat melalui *Baitul Maal* atau BAZIS yang dikelola oleh *amil-amil* yang profesional, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Konsentrasi harta di tangan segolongan masyarakat kaya perlu diseimbangkan melalui institusi zakat, sama halnya dengan konsentrasi politik pada segelintir elit politik harus

diselesaikan melalui institusi *syura* (musyawarah). Seterusnya, institusi *wakaf* juga harus diberi perhatian khusus agar harta-harta *wakaf* dapat berfungsi maksimal dalam memberantas kemiskinan. Begitu juga, hukum warisan perlu diberi perhatian tersendiri agar si penerima warisan memiliki kesadaran untuk menggunakan harta warisan tersebut secara produktif.

## Belajar dari Sejarah

Agar semua strategi pemberantasan kemiskinan di Aceh menuai kesuksesan, Pemerintah Aceh mutlak harus memiliki "*sense of crisis*" dan "*sense of belonging*" terhadap rakyatnya. Dalam memberantas kemiskinan rakyat Aceh, pemerintah harus bertindak laksana orang tua terhadap anaknya. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW:

*"Sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam (pimpinan negara) yang telah dipilih adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan setiap laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga dan ia bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan setiap wanita adalah pemimpin terhadap rumah tangga dan anak mereka dan ia bertanggung jawab kepada mereka, dan seorang pekerja adalah pemimpin terhadap kepemilikan majikan dan ia bertanggung jawab terhadapnya. Sungguh, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinya"* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini secara jelas mendudukkan tanggung jawab pemerintah Aceh terhadap rakyatnya adalah sama posisinya seperti tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dengan kata lain, sebagaimana orang tua adalah pemimpin atau wali yang secara moral dan legal bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, maka pemerintah juga memiliki tanggung jawab secara moral dan legal terhadap kesejahteraan ekonomi rakyatnya tidak saja dalam bentuk material tapi juga terhadap kebutuhan spiritual (Muhammad Asad, 1980).

Besarnya tanggung jawab pemerintah terhadap ekonomi rakyatnya, dapat dilihat dari kata-kata Khalifah Umar bin Khattab ra ketika menghadapi musim paceklik atau kelaparan, seperti disebutkan Mun'in al-Jammal (1992) sebagai berikut:

*"Jikalau takdirnya kelaparan seperti ini berkepanjangan, niscaya akan saya titipkan setiap orang yang menghadapi kelaparan itu kepada setiap rumah yang dihuni orang Islam (untuk dijadikan saudara angkat yang akan menanggung makanan dan minuman mereka), karena sungguh manusia itu tidak akan mati dengan hanya makan setengah kenyang saja"*.

Sebagai *Amir al-Mukminin*, keseriusan Umar bin Khattab dalam menjalankan amanah kekhalifahan sebagaimana ditulis dalam artikel Umer Chapra (1995) sebagai berikut:

*"setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap harta di dalam masyarakat, tidak ada seorang pun, termasuk Umar sendiri boleh memiliki hak yang lebih besar terhadapnya daripada orang lain, dan siapapun yang hidup lebih lama, dia akan melihat bahwa sungguhpun seorang penggembala di Bukit Sinai, Umar memastikan bahwa penggembala itu akan menikmati bagiannya dari harta itu"*.

Mengapa Umar bin Khattab begitu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pokok warga negaranya? Jawabnya, adalah tidak lain karena pemenuhan kebutuhan pokok yang memadai, secara otomatis akan dapat mengangkat martabat ekonomi dan ketaqwaan umat Islam kepada KhaliqNya. Sedangkan kemiskinan jelas akan menghalangi kerja-kerja kebajikan bisa dilakukan dengan penuh konsentrasi (*kusyuk*) dan sempurna. Sebaliknya, jika seseorang sudah mamadai pendapatannya, maka dengan sendirinya pula, ia akan lebih berkonsentrasi dan berkesempatan untuk *berubudiyah* secara *kusyuk* dan *tawadhuk* kepada Allah SWT. Ini berarti bahwa pemerintah harus menyediakan semua kebutuhan pokok kepada rakyatnya, sementara itu rakyat tidak boleh duduk berpangku tangan saja dan malas bekerja serta hanya menunggu belas kasih pemerintah.

Akan tetapi pemerintah dan rakyat harus bersama-sama bersatu padu dan bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, aman, damai, adil, dan makmur.

## Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep kemiskinan dalam Islam jauh lebih komprehensif dari konsep kemiskinan konvensional. Kemiskinan yang menimpa rakyat Aceh bukan merupakan suatu takdir dan nasib semata, melainkan sebagai akibat dari ulah tangan umat Islam sendiri yang telah jauh meninggalkan aturan Ilahiah. Islam tidak menerima kemiskinan sebagai suatu kebudayaan hidup yang normal, karenanya ia harus dikikis habis sampai ke akarnya.

Agar segera keluar dari lembah kemiskinan, maka rakyat Aceh harus senantiasa meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Apapun kegiatan yang kita geluti haruslah berjalan atas rel Ilahiah. Golongan elit harus berkrompromi dan tidak memonopoli kekuasaan dan kekayaan rakyat. Pembangunan haruslah dibagi secara adil antar rakyat Aceh. Sistem perpolitikan dan perekonomian Aceh haruslah demokratis, bersih dari KKN dan berkeadilan. Orang kaya harus menunaikan haknya (zakat) kepada si miskin. Yang berkuasa tidak boleh menindas "*hamba laeh*". Para pejabat pantang untuk mengambil kesempatan dalam kekeruhan politik Aceh. Kedamaian di Bumi Aceh harus dipertahankan. Penderitaan demi penderitaan harus segera ditamatkan. Akhirnya, rakyat Aceh harus bekerja keras untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan tanpa mengabaikan tujuan ukhrawi. Bila semua ini dapat kita lakukan, *Insy Allah* rakyat Aceh akan segera terbebas dari belenggu kemiskinan.

## Daftar Pustaka

- Alcock, Pete. 1993. *Understanding Poverty*. UK: MacMillan Press Ltd.
- al-Jammal, Muhammad Abdul Mun'im. 2000. "Ensiklopedia Ekonomi Islam", (terj) Salahuddin Abdullah. *Mausu'at al-Iqtisad al-Islami*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
- Asad, Muhammad. 1980. *The Principles of State and Government in Islam*. Malaysia: Islamic Book Trust.
- Chapra, M. Umer. 1995. *The Islamic Welfare State and Its Role in Economy* Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Ibn Khaldun. 1993. "Mukadimah Ibnu Khaldun", (terj) *Muqaddimah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
- Imam Nawawi. 2000. "Riyadhus Salihin. Jilid 1 & 2", (terj) M. Ardai Rathomy. *Taman Orang-orang Salih*. Singapura: Pustaka Nasional PTE. Ltd.
- Karl Marx. 1987. *Das Kapital*, (terj) S. Moore and E. Avehing. 3<sup>rd</sup> Edition. London: F. Engels.
- Kementerian Agama RI. 1974. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Pakistan: The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies.
- Mannan, M. A. 1988. "The Economics of Poverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries", dalam Munawar Iqbal (ed). *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.

- Pramanik, Ataul Huq. 1993. *Development and Distribution in Islam*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
- Ul-Haq, Irfan. 1996. *Economic Doctrines of Islam: A Study in the Doctrine of Islam and Their Implications for Poverty, Employment and Economic Growth*. Herdon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought.
- World Bank. 1999. *World Bank Report*.
- World Bank. 2000/2001. *World Development Report: Attacking Poverty*. World Bank: Oxford University Press.

